

## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2008–2013 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

##### **4.1.1. Bidang Pendidikan,**

Permasalahan utama adalah (1) putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang didominasi anak usia 16 – 18 tahun; (2) anak usia sekolah yang bekerja; (3) aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah; (4) ruang kelas untuk siswa SMP dan SMA di beberapa wilayah masih terbatas dan rusak serta ruang lainnya (laboratorium, perpustakaan); (5) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing; (6) biaya pendidikan menengah dan tinggi mahal.

##### **4.1.2. Bidang Kesehatan,**

Permasalahan utamanya adalah: (1) Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat dan terjadi Penyebaran beberapa penyakit menular ( multiple burden of disease ) diluar sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (new emerging dan re-emerging) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan lingkungan, (2) Sistem Kesehatan Belum Responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berdasarkan jumlah sarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di kabupaten/kota (3) Sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif dan preventif, hal ini terlihat dari proporsi anggaran lebih tinggi untuk kuratif, (4) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat, (5) Belum terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standard dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang prima; (6) Belum optimalnya aspek Regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;

#### **4.1.3. Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama adalah (1) masih tingginya pencemaran lingkungan; (2) belum tercapainya fungsi kawasan lindung secara optimal; (3) masih tingginya emisi gas rumah kaca (GRK); (4) masih adanya konflik pemanfaatan ruang; (5) kerusakan ekosistem mangrove dan kawasan pesisir.

#### **4.1.4. Bidang Pekerjaan Umum**

Permasalahan utama pada aspek kebinamargaan adalah (1) belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur; (2) belum terpenuhinya standar lebar jalan pada sebagian besar jalan provinsi. Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah: (1) rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; (2) tingginya kerusakan jaringan irigasi; (3) menurunnya daya tampung sungai. Permasalahan utama pada aspek keciptakaryaan adalah: (1) rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum (2) rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, drainase); (3) terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional.

#### **4.1.5. Bidang Penataan Ruang**

Permasalahan utama adalah (1) belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang; (2) rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan; (3) menurunnya ketersedianya ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau (RTH) publik; (4) belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi; (5) belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat – pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

#### **4.1.6. Bidang Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan utama adalah (1) sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal; (2) kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah;

#### **4.1.7. Bidang Perumahan**

Permasalahan utama adalah rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin dan buruh serta tingginya *backlog* (tidak seimbangya kebutuhan dan penyediaan) rumah sebanyak 1,3 juta.

#### **4.1.8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan utama adalah (1) terbatasnya ketersediaan sarana olahraga baik berskala nasional maupun internasional; (2) terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri; (3) rendahnya mental juara.

#### **4.1.9. Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan utama adalah (1) biaya ekonomi tinggi, kepastian hukum dan jaminan keamanan berusaha; (3) kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata; (4) konflik dalam hubungan industrial.

#### **4.1.10. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan utama adalah (1) rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi; (2) rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; (3) daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; (4) rendahnya inovasi dan pengembangan produk.

#### **4.1.11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

Permasalahan utama adalah (1) penduduk migran belum terdokumentasikan secara baik; (2) pengendalian penduduk belum optimal.

#### **4.1.12. Bidang Ketenagakerjaan**

Permasalahan utama adalah (1) kualitas tenaga kerja masih rendah; (2) persebaran tenaga kerja yang tidak merata; (3) tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah.

#### **4.1.13. Bidang Ketahanan Pangan**

Permasalahan utama adalah (1) pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (2) tingginya ketergantungan impor pangan strategis; (3) penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas; (4) masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

#### **4.1.14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan utama adalah (1) kesetaraan gender; dan (2) masih rentan permasalahan *trafficking* dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **4.1.15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Permasalahan utama adalah (1) kurangnya tenaga penyuluh KB; (2) kualitas pelayanan belum maksimal sehingga Intensifikasi Pelayanan KB sangat penting. (3) belum optimalnya ketahanan keluarga; (4) masih kuranya kesadaran masyarakat untuk ber-KB.

#### **4.1.16. Bidang Perhubungan**

Permasalahan utama bidang perhubungan adalah (1) belum berkembangnya sistem transportasi masal dan integrasi antar moda angkutan; (2) masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya *overloading* angkutan barang; (3) belum memadainya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang baik domestik maupun internasional; (4) belum tersedianya pelabuhan laut internasional dan belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau. **4.1.17.**

#### **4.1.17. Bidang Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan utama adalah (1) Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal, (2) penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

#### **4.1.18. Bidang Pertanahan**

Permasalahan utama adalah (1) banyaknya tanah belum bersertifikat, (2) penyelesaian tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain.

#### **4.1.19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Permasalahan utama adalah (1) pendidikan politik masyarakat masih rendah; (2) krisis kepercayaan terhadap pemerintah; (4) harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun; (5) terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### **4.1.20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian,**

Permasalahan utama adalah (1) belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; (2) penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM); (3) kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*; (4) masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur; (5)

pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; (6) sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas; (7) belum tuntasnya batas administrasi Daerah; (8) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat; (8) belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan Anggaran.

#### **4.1.21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan utama adalah (1) minimnya sarana dan prasarana di pedesaan; (2) belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur Desa; (3) rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.

#### **4.1.22. Bidang Sosial**

Permasalahan utama adalah (1) kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (2) belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan; (3) belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; (4) belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### **4.1.23. Bidang Kebudayaan**

Permasalahan utama adalah (1) masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; (2) kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda; (3) masih rendahnya promosi budaya lokal Jawa barat di dalam dan luar negeri.

#### **4.1.24. Bidang Statistik**

Permasalahan utama adalah (1) masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik; (2) referensi data pembangunan yang berbeda-beda.

#### **4.1.25. Bidang Kearsipan**

Permasalahan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;

#### **4.1.26. Bidang Perpustakaan**

Permasalahan utama adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana; (2) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;

#### **4.1.27. Bidang Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan utama adalah (1) keterbatasan tenaga penyuluh; (2) Kualitas sumberdaya manusia masih rendah; (3) kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran; (4) masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap.

#### **4.1.28. Bidang Pertanian**

Permasalahan utama adalah (1) masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi daging sapi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan rumah tangga dan industri pengolahan; (2) masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; (3) rusaknya kondisi infrastruktur jalan, kesuburan lahan dan irigasi ke sentra produksi; (4) tingginya konversi lahan pertanian dan tidak jelasnya status lahan HGU di Jabar Selatan; (5) rendahnya perlindungan terhadap petani produsen; (6) Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas; (7) Masih tingginya impor bahan pangan (daging, beras, dan hortikultura); (8) masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian.

#### **4.1.29. Bidang Kehutanan**

Permasalahan utama adalah (1) tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan; (2) belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan lindung; (2) belum optimalnya konservasi hutan dan lahan; (3) rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar kehutanan.

#### **4.1.30. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan utama adalah (1) belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah; (2) terbatasnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral; (3) belum optimalnya pendayagunaan produksi energi sumber daya mineral; (4) belum optimalnya penanganan dan mitigasi bencana alam geologi.

#### **4.1.31. Bidang Pariwisata**

Permasalahan utama adalah (1) belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing; (2) tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan multistakeholders (sesuai UU 10/2013); (3) belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan; (4) belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.

#### **4.1.32. Bidang Perindustrian**

Permasalahan utama adalah (1) Pemanfaatan bahan baku lokal rendah; (2) Inovasi produk masih rendah; (3) SDM masih rendah; (4) Penguasaan teknologi rendah; (5) Kurangnya produktivitas bahan baku substitusi impor.

#### **4.1.33. Bidang Perdagangan**

Permasalahan utama adalah: (1) lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; (2) terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; (3) kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM; (4) berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; (5) kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.

#### **4.1.34. Bidang Ketramigrasian**

Permasalahan utama adalah (1) kesiapan tempat transmigran tidak sesuai dengan yang diharapkan, (2) kesiapan sumber daya manusia yang dikirim menjadi transmigran.

### **4.2 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
- 2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
- 3) Pengangguran dan ketenagakerjaan.
- 4) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis
- 6) Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya *Jabar Green Province*.
- 7) Kualitas demokrasi
- 8) Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana
- 9) Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- 10) Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal
- 11) Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat
- 12) Penanggulangan penduduk miskin.
- 13) Pasar global dan *Asean – China Free Trade Area (ACFTA)*
- 14) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- 15) Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)
- 16) Ketahanan Pangan
- 17) Keamanan dan ketertiban daerah